Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Menekan Angka Kelahiran Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Nabila¹, Abdurr Razzaq², Bela Janare Putra³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia
E-mail addresses: nbila7798@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 31, 2025

Revised June 02, 2025

Accepted June 11, 2025

Available online June 19, 2025

Kata Kunci:

Penyuluh KB, Pasangan Usia Subur, Program KB, Pengendalian Penduduk

Keywords:

Family Planning Counselor, Fertile Age Couples, Family Planning Program, Population Control

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan angka kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB berperan sebagai pengelola program, penggerak partisipasi masyarakat, pemberdaya keluarga, serta pelaksana komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keluarga berencana. Kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya dukungan sarana. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan dan koordinasi lintas sektor.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Family Planning Counselors (PKB) of the Women's Empowerment and Child Protection Service and Population and Family Planning Control in reducing the birth rate of Fertile Age Couples (PUS) in Indralaya District, Ogan Ilir Regency. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that PKB plays a role as a program manager, community participation

motivator, family empowerer, and implementer of communication, information, and education related to family planning. The main obstacles are the low level of community understanding and limited support facilities. Recommendations include increasing training and cross-sector coordination.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk merupakan isu krusial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah telah menjalankan Program Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1970 sebagai upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur jumlah kelahiran, tetapi juga menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Namun, pelaksanaan program KB masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di daerah seperti Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini mencapai 1,8% per tahun, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan dominasi usia muda yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran melalui program KB masih belum berjalan optimal.

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) memiliki peran strategis dalam menyukseskan program KB. Sebagai ujung tombak di lapangan, PKB bertanggung jawab dalam memberikan edukasi, konseling, serta memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan KB. Peran ini menjadi semakin penting mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, serta adanya tantangan sosio-kultural dan ekonomi yang menghambat partisipasi pasangan usia subur (PUS) dalam program KB.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menekan angka kelahiran, namun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap peran PKB dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Indralaya, dengan tujuan untuk memahami kontribusi mereka dalam menekan angka kelahiran dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh PKB, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi program KB yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yaitu metode yang berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang terjadi langsung di lapangan. Pendekatan ini karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Untuk Menekan Angka Kelahiran Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menangkap realitas sosial dari sudut pandang partisipan dan Menyusun narasi factual yang kaya akan konteks.

Penelitian dilakukan secara naturalistik, artinya peneliti berinteraksi langsung dengan objek penelitian dalam lingkungan aslinya tanpa manipulasi variabel. Dalam konteks ini, peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, pengamatan, interpretasi, serta penarikan kesimpulan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera No. Km. 35, Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat kegiatan Penyuluh Keluarga Berencana Bekerja.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dalam konteks yang alami, khususnya mengenai peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menekan angka kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa deskripsi, narasi, dan interpretasi terhadap fenomena sosial yang dikaji. Data dikumpulkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pelaksanaan program Keluarga Berencana oleh PKB, termasuk strategi, kendala, dan efektivitas penyuluhan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama yang saling melengkapi, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati aktivitas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh pemahaman tentang interaksi antara penyuluh dan masyarakat, bentuk kegiatan penyuluhan, serta dinamika sosial yang memengaruhi keberhasilan program. Teknik observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data faktual mengenai situasi, perilaku, dan peran PKB di lingkungan tempat mereka bertugas.

b. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, seperti Kepala Dinas, Penyuluh KB, dan anggota masyarakat, khususnya Pasangan Usia Subur (PUS). Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dengan pedoman pertanyaan yang fleksibel, untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi para pelaku program KB. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, serta memahami persepsi subjektif informan mengenai efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan program.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti laporan kegiatan, data statistik kependudukan, arsip program KB, dan dokumen internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kecamatan Indralaya. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks tambahan yang penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi penyuluhan dan pelaksanaan program KB secara menyeluruh.

Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif guna meningkatkan validitas dan reliabilitas data, dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan secara sistematis sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan

kesimpulan akhir. Proses analisis mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menyoroti data yang paling relevan dengan fokus penelitian dan membuang informasi yang tidak berkaitan. Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan indikator yang sesuai dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah interpretasi. Penyajian data membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan dinamika antara kategori temuan. Data disusun dalam bentuk yang terstruktur sehingga pembaca dapat memahami hasil temuan secara menyeluruh.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan mencocokkan temuan yang telah dianalisis dengan data lapangan tambahan atau data sekunder untuk memastikan validitasnya. Proses ini menghasilkan kesimpulan akhir yang merefleksikan makna dari fenomena yang diteliti secara mendalam.

Melalui tahapan ini, analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu dimulai dari data empiris di lapangan, kemudian dikembangkan menjadi konsep atau pola yang bermakna, yang akhirnya dijadikan dasar penarikan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia. Fokus utama dinas ini meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di tingkat kabupaten.

Pembentukan DPPPAPPKB merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Dinas ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan nasional seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peran Penyuluh Keluarga Berencana

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB), khususnya dalam menekan angka kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS). Sebagai ujung tombak di lapangan, mereka berperan langsung dalam memberikan edukasi, konseling, serta memfasilitasi akses

masyarakat terhadap layanan KB. Dalam konteks Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, peran PKB mencakup lima aspek utama:

1. **Pengelola Pelaksana Program KB**

PKB bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola pelaksanaan program KB di wilayah binaan. Mereka menyusun kegiatan, mengolah informasi, dan memastikan bahwa program KB tersampaikan kepada masyarakat secara efektif dan terorganisir.

2. **Penggerak Partisipasi Masyarakat**

PKB berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah lokal, dan lembaga kemasyarakatan dalam mensosialisasikan pentingnya program KB. Peran ini penting untuk membangun kesadaran dan dukungan sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi dan perencanaan keluarga.

3. **Pemberdaya Keluarga dan Masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, PKB memberdayakan masyarakat dengan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, pengaturan kelahiran, dan pentingnya keluarga kecil berkualitas. Penyuluh mengidentifikasi potensi dan permasalahan keluarga sebagai dasar untuk intervensi yang lebih tepat.

4. **Pengumpul dan Pengelola Data Lapangan**

PKB mengumpulkan dan mengelola data terkait PUS dan peserta KB di wilayahnya. Data ini penting untuk merancang program yang tepat sasaran, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, serta menyusun profil keluarga berbasis kondisi riil di lapangan.

5. **Penggalang dan Pengembang Kemitraan**

PKB menjalin kemitraan strategis dengan tenaga kesehatan, perangkat desa, dan organisasi masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Kolaborasi ini mencakup dukungan logistik, administrasi, dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Selain itu, dalam menjalankan perannya, PKB juga aktif memberikan informasi dan edukasi kepada PUS melalui berbagai kegiatan seperti: Sosialisasi kelompok dengan metode ceramah dan diskusi. Kunjungan rumah untuk pelayanan langsung dan komunikasi personal. Distribusi media edukasi berupa brosur dan leaflet KB.

Melalui kegiatan ini, PKB tidak hanya menyampaikan informasi teknis tentang alat kontrasepsi, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Tantangan dan Hambatan Penyuluh Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung terhadap efektivitas program Keluarga Berencana (KB), khususnya dalam menjangkau dan memengaruhi Pasangan Usia Subur (PUS). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu tantangan internal dan eksternal:

1. ***Tantangan Internal***

Terbatasnya Jumlah Tenaga Penyuluh

Di beberapa wilayah kerja, jumlah PKB tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah sasaran yang harus dijangkau. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi satu penyuluh, terutama dalam kegiatan penyuluhan langsung seperti kunjungan rumah atau pelatihan kelompok. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Fasilitas seperti media edukasi, alat peraga kontrasepsi, kendaraan operasional, serta ruang layanan konseling yang memadai seringkali belum tersedia secara optimal. Minimnya sarana ini menghambat pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan menarik. Keterbatasan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Penyuluh masih membutuhkan pelatihan berkelanjutan mengenai teknik konseling, pendekatan berbasis hak reproduksi, dan penguasaan materi KB terkini agar dapat memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada PUS.

2. Tantangan Eksternal

Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Banyak masyarakat, khususnya di pedesaan, yang masih memiliki pemahaman yang rendah atau bahkan keliru mengenai tujuan dan manfaat program KB. Beberapa PUS masih menolak penggunaan kontrasepsi karena alasan agama, budaya, atau mitos yang berkembang di masyarakat. Kurangnya Dukungan dari Tokoh Masyarakat dan Keluarga Keberhasilan program KB sangat dipengaruhi oleh dukungan dari tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga. Kurangnya keterlibatan mereka dalam proses penyuluhan menyebabkan pesan KB sulit diterima atau dianggap tidak relevan. Hambatan Sosial dan Budaya Di beberapa komunitas, pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi dan kontrasepsi masih dianggap tabu, terutama ketika disampaikan kepada kelompok perempuan atau remaja. Hal ini membatasi ruang gerak penyuluh dalam menyampaikan informasi secara terbuka dan menyeluruh.

Penyuluh KB menyadari bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor, pelibatan tokoh lokal dalam penyuluhan, dan penggunaan media komunikasi yang lebih kreatif dan kontekstual. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penambahan anggaran, pelatihan, serta distribusi alat bantu edukasi juga sangat dibutuhkan untuk menunjang efektivitas tugas penyuluh di lapangan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menekan angka kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dapat disimpulkan bahwa:

1. PKB memiliki peran strategis dan multifungsi dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Peran tersebut mencakup: Sebagai pengelola pelaksana program KB, PKB merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan KB di lapangan. Sebagai penggerak partisipasi masyarakat, PKB menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga lokal untuk meningkatkan partisipasi PUS dalam program KB. Sebagai pemberdaya keluarga, PKB mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sebagai pengelola data, PKB melakukan pemantauan, pendataan, dan evaluasi terhadap sasaran KB di wilayah tugasnya. Sebagai pengembang

- kemitraan, PKB membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pelaksanaan program.
2. Kegiatan edukatif yang dilakukan oleh PKB seperti sosialisasi, kunjungan rumah, dan penyebaran media informasi telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai KB. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan metode komunikasi agar informasi lebih mudah dipahami dan diterima.
 3. Tantangan yang dihadapi oleh PKB meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB. Faktor sosial budaya, seperti mitos dan pemahaman agama yang keliru, juga menjadi hambatan dalam implementasi program.
 4. Untuk meningkatkan efektivitas peran PKB, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan, pengadaan alat bantu edukasi, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, pendekatan yang lebih humanis dan berbasis budaya lokal perlu terus dikembangkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

Dengan demikian, peran PKB sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program KB di tingkat lapangan. Peran ini perlu terus diperkuat agar tujuan menekan angka kelahiran dan menciptakan keluarga kecil yang berkualitas dapat tercapai secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). Rencana Strategis BKKBN 2020-2024.
- Goss, Mason, & McEachern. (n.d.). *Role Theory and Social Status*.
- Hawthorn, G. (1970). *Theory and Explanation in Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). *Keluarga Berencana*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kepmenpan Nomor 120 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Sapriansyah. (2020). *Peran Penyuluh KB dalam Mensosialisasikan Metode Kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi di Kota Banjarmasin*. Skripsi. IAIN Antasari Banjarmasin.
- Pasra, dkk. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Kepadatan Penduduk di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmiah Universitas Riau*.
- Ritonga, A. (2020). *Kebijakan Pemerintah terhadap Program Keluarga Berencana di Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi*. Skripsi. Universitas Jambi.
- WHO. (2018). *Family Planning and Health Outcomes*. Geneva: World Health Organization.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.